

Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat

Hardika Vanzani¹, Urmatul Uska Akbar²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: : vanzanihardika12@gmail.com, urmatulakbar@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

8 Agustus 2025

Disetujui:

10 Agustus 2025

Terbit daring:

15 Agustus 2025

DOI: -

Sitasi:

Vanzani, H & Akbar, U.U (2025). Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat

Abstract:

This research aims to analyze how the Minimum Wage, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Education, and Labor Force Participation Rate influence the Open Unemployment Rate in West Sumatra Province. The study employs panel data analysis using the Fixed Effect Model (FEM). The Open Unemployment Rate serves as the dependent variable, with Minimum Wage, GRDP, Education, and Labor Force Participation Rate as the independent variables. Findings reveal that both minimum wage and education exert a positive yet statistically insignificant impact on the open unemployment rate, while Gross Regional Domestic Product and labor force participation rate significantly and negatively affect the unemployment level.

Keywords: Open Unemployment Rate, Minimum Wage, Gross Regional Domestic Product, Education, and Labor Force Participation Rate

Abstrak:

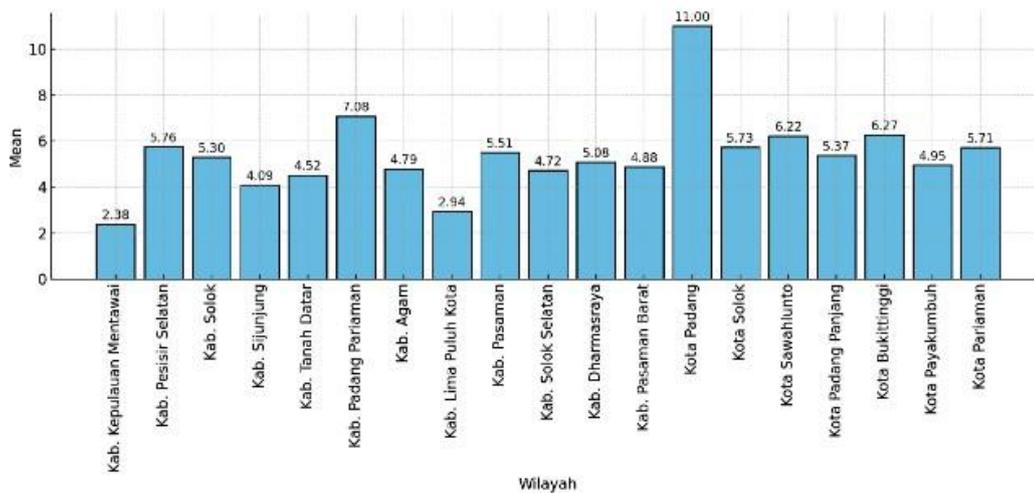
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah analisis data panel dengan Model Efek Tetap (Fixed Effect Model atau FEM). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, variabel independen Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan upah minimum dan pendidikan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan produk domestik regional bruto dan tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kode Klasifikasi JEL: H52, J64, J31

PENDAHULUAN

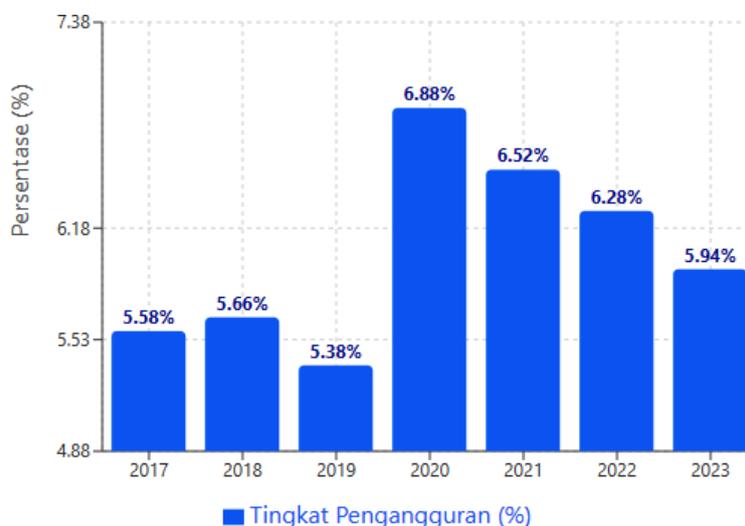
Pembangunan merupakan hasil usaha yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dalam berbagai sektor seperti ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, pendidikan dan industri. Salah satu sasaran pembangunan adalah menekan tingkat pengangguran serendah-rendahnya. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah (Puspajuita, 2017). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi sumber utama permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan permasalahan sosial seperti pemicu terjadinya kriminalitas serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Rambe, 2019). Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Permasalahan pengangguran terjadi hampir di seluruh Provinsi di Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik

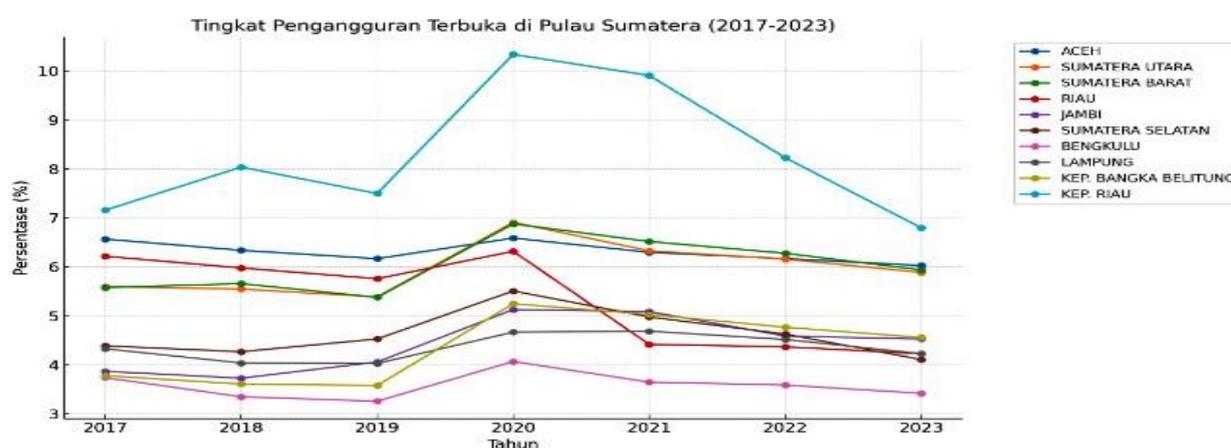
Gambar 1. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota (2017–2023)

Gambar 1 menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat per kabupaten/kota (2017–2023), daerah dengan rata-rata TPT tertinggi adalah Kota Padang sebesar 11 persen, diikuti Kabupaten Padang Pariaman sebesar 7,08 persen, Kota Bukittinggi sebesar 6,27 persen, Kota Sawahlunto sebesar 6,22 persen, serta Kota Solok sebesar 5,73 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 2,38 persen dan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 2,94 persen. Wilayah lainnya berada pada kisaran 4 hingga 5 persen, seperti Kabupaten Sijunjung sebesar 4,09 persen, Kabupaten Tanah Datar sebesar 4,52 persen, Kabupaten Agam sebesar 4,79 persen, Kabupaten Pasaman Barat sebesar 4,88 persen, serta Kota Payakumbuh sebesar 4,95 persen. Data ini menunjukkan adanya variasi tingkat pengangguran antar kabupaten/kota di Sumatera Barat selama periode 2017–2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2023

Gambar 2 menunjukkan bahwa, secara umum TPT di Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi selama periode penelitian. TPT sempat naik pada tahun 2018 dan turun kembali pada tahun 2019 yang kemudian melonjak tinggi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak dari pandemi. Setelah itu TPT mulai perlahan turun sampai tahun 2023, meskipun belum kembali ke level terendah seperti tahun 2019. Walaupun trend pengangguran mulai membaik dari tahun 2020, namun jumlah orang yang belum bekerja masih banyak di Sumatera Barat. Persentase penurunan angka pengangguran di Sumatera Barat masih tergolong kecil, hal ini bisa disebabkan karena penanggulangan pengangguran belum sepenuhnya diiringi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan banyaknya orang yang ingin bekerja. Meskipun jumlah pengangguran di Sumatera Barat turun, tetapi kenyataannya angka pengangguran di Sumatera Barat masih termasuk yang tertinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di provinsi yang ada di pulau Sumatera.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017-2023

Gambar 3 dapat kita lihat bahwa, secara umum, tren penurunan TPT di Sumatera Barat menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Namun, laju penurunan tersebut tidak secepat beberapa provinsi lain di Sumatera yang berhasil menekan tingkat pengangguran hingga di bawah 5%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perbaikan telah terjadi, Sumatera Barat masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyerapan tenaga kerja. Faktor-faktor seperti pertumbuhan sektor industri, pengembangan sektor informal, serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan untuk mendorong penurunan tingkat pengangguran lebih lanjut di masa depan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka diantaranya yaitu upah minimum, produk domestik regional bruto, pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Menurut Sholeh (2007) upah minimum dapat melindungi pekerja di pasar monopsoni dari eksploitasi, terutama bagi pekerja dengan keterampilan rendah. Selain itu, upah minimum dipercaya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi dampak pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional. Menurut Muslim (2014) kenaikan PDRB suatu daerah dapat dikaitkan dengan rendahnya jumlah pengangguran pada daerah tersebut diakarenakan kenaikan PDRB akan meningkatkan produksi yang akan

memicu penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Sementara, Siahaan (2022), menjelaskan bahwa pendidikan dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka karena setiap penambahan satu tahun sekolah akan meningkatkan kemampuan dan pendapatan selama satu tahun sekolah tersebut. Dan Simbolon dkk (2023), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa TPAK meningkat maka tingkat pengangguran terbuka juga akan meningkat. Hal ini terjadi karena semakin banyak persaingan di antara angkatan kerja, apalagi banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan yang tersedia, dapat menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka.

Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya dengan menganalisis pengaruh beberapa variabel sosial ekonomi utama terhadap tingkat pengangguran terbuka pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017–2023. Variabel yang dianalisis mencakup tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, produk domestik regional bruto, pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Masing-masing variabel dipilih berdasarkan kajian teoritis dan temuan empiris yang telah terbukti relevan dalam literatur sebelumnya.

Teori yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936 menyatakan bahwa pengangguran terjadi akibat melemahnya konsumsi masyarakat, yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Selain itu, ketidakfleksibelan tingkat upah di pasar tenaga kerja juga menjadi faktor penyebab. Dalam kondisi ekonomi nasional yang mengalami stagnasi, permintaan terhadap barang dan jasa menurun, sehingga produksi perusahaan ikut menurun dan banyak tenaga kerja yang tidak terserap, sehingga terjadi pengangguran. Seharusnya, penurunan produksi diikuti oleh penurunan upah, namun karena upah tidak dapat menyesuaikan secara fleksibel, hal ini mengakibatkan pengangguran akibat kekurangan permintaan agregat (Sukirno, 2010).

Teori upah menyatakan bahwa upah yang tinggi dapat membantu mempertahankan tenaga kerja yang ada, karena karyawan yang ingin keluar dari perusahaan tidak akan mudah digantikan dengan tenaga kerja baru yang kurang berpengalaman dan terampil (Mankiw, 2006).

Beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan upah perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

1. Teori Upah Normal (David Ricardo)
Menurut teori ini, upah ditentukan berdasarkan biaya pemenuhan kebutuhan pekerja. Ricardo menekankan bahwa jumlah upah yang diterima pekerja dianggap wajar karena mencerminkan kemampuan pemberi kerja untuk membayarnya.
2. Teori Upah Besi (Ferdinand Lassale)
Teori ini menyatakan bahwa upah normal hanya menguntungkan majikan, sehingga para buruh harus menentangnya. Lassale berpendapat bahwa pekerja perlu memperjuangkan hak mereka agar dapat hidup lebih bahagia dan sejahtera, menolak ketentuan upah yang hanya berpihak pada majikan.
3. Teori Dana Upah (John Stuart Mill)
Teori ini menyatakan bahwa upah tidak perlu dipermasalahkan seperti dalam teori Undang-Undang Upah Besi, karena upah bergantung pada jumlah dana yang tersedia di masyarakat. Jika dana melimpah, upah akan meningkat, tetapi jika dana berkurang, upah pekerja juga akan menurun. Namun, fokus teori ini bukan pada besarnya upah yang diterima, melainkan pada sejauh

mana upah tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja (Zainal Asikin, 2012).

Teori Hukum Okun yang diperkenalkan oleh Arthur Melvin Okun pada tahun 1962 menjelaskan adanya keterkaitan antara tingkat pengangguran dan output dalam siklus ekonomi. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Pada negara berkembang yang rentan terhadap ketidakpastian kerja, teori ini dapat menjadi acuan kebijakan. Peningkatan PDRB mampu memperluas kesempatan kerja sehingga lebih banyak pencari kerja dapat terserap. Sebaliknya, ketika PDRB riil menurun, produktivitas dan output juga akan berkurang. Penurunan produksi tersebut mendorong perusahaan mengurangi tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran (Nur Fitri Yanti, 2017).

Teori Human Capital berasumsi bahwa peningkatan pendidikan individu dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan yang diperoleh. Dalam teori ini dijelaskan bahwa setiap tambahan tahun pendidikan akan berdampak pada peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya mendorong kenaikan pendapatan. Namun demikian, manfaat ekonomi dari pendidikan tidak dirasakan secara langsung, melainkan tertunda setidaknya satu tahun setelah pendidikan tersebut diselesaikan. Peningkatan pendapatan tersebut mencerminkan hasil dari meningkatnya tingkat pendidikan seseorang (Mankiw, 2006).

Terdapat dua teori penting yang dikemukakan oleh para ahli dalam konteks masalah ketenagakerjaan. Teori tersebut yaitu:

1. Teori Lewis (1959)

Menurut Lewis, surplus tenaga kerja bukanlah hambatan bagi pembangunan ekonomi, melainkan dapat menjadi modal untuk meningkatkan pendapatan, asalkan perpindahan tenaga kerja antar sektor berlangsung dengan baik dan tidak menimbulkan kepadatan berlebihan atau *overcrowding* (Rivai dkk, 2014).

2. Teori Fei-Ranis (1961)

Menurut Fei-Ranis, terdapat tahapan dalam pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan keadaan kelebihan buruh. Pada tahap awal, tenaga kerja yang menganggur dan tidak memberikan kontribusi terhadap output di sektor pertanian dipindahkan ke sektor industri, dengan tingkat upah yang setara. Selanjutnya, meskipun tenaga kerja di sektor pertanian mulai memberikan kontribusi terhadap produksi, output yang dihasilkan masih belum sebanding dengan upah yang diterima. Oleh karena itu, mereka tetap dialihkan ke sektor industri. Tahap akhir ditandai dengan fase pertumbuhan yang bersifat mandiri, di mana tenaga kerja di sektor pertanian mulai menghasilkan output yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat upahnya. Pada fase ini, kelebihan tenaga kerja akan terserap oleh sektor industri dan jasa yang berkembang seiring meningkatnya produktivitas dan ekspansi kegiatan ekonomi (Rivai et al., 2014).

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat”. Variabel-variabel ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen di Sumatera Barat selama periode penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaruh dari variabel bebas (*Independen*) yaitu upah minimum, produk domestik regional bruto, pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap variabel terikat (*Dependen*) yaitu tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel (*time series* dan *cross section*) dari Badan Pusat Statistika (BPS). Data yang digunakan merupakan data periode 2017-2023 terhadap 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan kemudian menggunakan analisis statistik untuk mengolah datanya. Berikut merupakan persamaan regresi data panel :

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}UM_{it} + \beta_2 \text{Log}PDRB_{it} + \beta_3 \text{PND}_{it} + \beta_4 \text{TPAK}_{it} + e_{it}$$

Dimana Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai TPT, β_0 merupakan konstanta, β_1 adalah Koefisien Regresi Upah Minimum, β_2 adalah koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto, β_3 adalah koefisien regresi Pendidikan, β_4 adalah koefisien regresi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, UM (Upah Minimum), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PND (Pendidikan), TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dan e_{it} merupakan error. Dimana Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Y, β_0 merupakan konstanta, β_1 adalah Koefisien Regresi Upah Minimum, β_2 adalah koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto, β_3 adalah koefisien regresi Pendidikan, β_4 adalah koefisien regresi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Dalam penelitian ini, terdapat definisi operasional variabel yaitu (1) pengangguran terbuka didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan. Keadaan ini umumnya terjadi akibat pertumbuhan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja, dengan satuan persen. Upah minimum merujuk pada standar upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan tertentu, dan diukur dalam satuan rupiah. (2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan nilai produksi yang dihitung menggunakan harga tetap pada tahun dasar tertentu, sehingga tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga atau inflasi, dengan satuan juta rupiah. (3) Pendidikan dalam penelitian ini diartikan sebagai proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk meningkatkan pemahaman, yang diukur menggunakan indikator rata-rata lama sekolah dalam satuan tahun. (4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, terhadap jumlah total penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam satuan persen.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan data panel. Model regresi data panel digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sepanjang periode penelitian. Pemilihan model estimasi terbaik (Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect) dilakukan melalui serangkaian pengujian, termasuk uji Chow dan uji Hausman. Seluruh pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EViews. Sebelum dilakukan estimasi, dilakukan juga uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dan heteroskedastisitas untuk memastikan

validitas model regresi yang digunakan. Hasil estimasi kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait topik penelitian di Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pemilihan model dalam regresi panel maka diperoleh hasil terbaik dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya, pada asumsi klasik uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas tidak terdapat masalah. Dalam hasil penelitian ini dapat ditentukan besar pengaruh upah minimum, produk domestik regional bruto, pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai variabel bebas terhadap tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel terikat.

Tabel 1 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	95.9041	39.61	2.42	0.017
Upah Minimum	1.0143	1.2	0.85	0.399
Produk Domestik Regional Bruto	-7.2286***	2.66	-2.72	0.008
Pendidikan	0.9259	0.69	1.35	0.181
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0.0001***	4.42	-2.48	0.015
R-squared	0.779890			
Adjusted R-squared	0.735868			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Keterangan Signifikansi:

*** signifikan pada tingkat 1% ($p < 0.01$)

** signifikan pada tingkat 5% ($p < 0.05$)

*signifikan pada tingkat 10% ($p < 0.10$)

Berdasarkan hasil estimasi analisis data panel pada tabel 1 terlihat bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh positif yaitu 1,014340 namun tidak signifikan dengan probabilitas 0,3987 yang mana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf nyata 0,05. Koefisien positif mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum cenderung meningkatkan tingkat pengangguran terbuka, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan sebesar 1% pada upah minimum akan meningkatkan pengangguran sebesar 1,014340%, dengan asumsi ceteris paribus.

Ketidaksignifikan upah minimum dapat dijelaskan oleh hubungan upah minimum dan pengangguran dalam konteks ekonomi regional yang disebabkan oleh beberapa faktor kontekstual yang spesifik untuk Sumatera Barat diantaranya yaitu, struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor informal dan pertanian skala kecil membuat implementasi kebijakan upah minimum menjadi terbatas. Sebagian besar pekerja di sektor ini tidak terikat dengan regulasi upah minimum, sehingga dampak kebijakan terhadap pasar tenaga kerja secara keseluruhan menjadi minimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Al Farrell (2022) yang menunjukkan bahwa upah

minimum berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Secara teori, kenaikan UMP cenderung memicu peningkatan pengangguran, sejalan dengan pandangan klasik yang menyatakan bahwa ketika upah minimum naik, biaya tenaga kerja perusahaan juga meningkat sehingga perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja, khususnya pada pekerjaan berupah rendah atau padat karya. Namun, pengaruh positif tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, meskipun kenaikan upah minimum cenderung diikuti oleh sedikit peningkatan pengangguran, hubungan tersebut tidak cukup kuat atau konsisten untuk dianggap memiliki pengaruh nyata berdasarkan data penelitian.

Selanjutnya, variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki koefisien sebesar $-7,228655$, dengan nilai probabilitas $0,0076 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hal ini berarti adanya peningkatan PDRB 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan berkurang sebesar $7,228655\%$, dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan Hukum Okun yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, yaitu ketika produk domestik bruto (PDB) meningkat, maka tingkat pengangguran cenderung menurun, dan sebaliknya.

Signifikansi pengaruh PDRB terhadap pengangguran dapat dijelaskan dalam mekanisme ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi regional menciptakan permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi melalui ekspansi aktivitas produksi. Ketika PDRB per kapita meningkat, ini mencerminkan peningkatan produktivitas dan output ekonomi yang memerlukan lebih banyak input tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi juga mendorong investasi baru yang menciptakan lapangan kerja tambahan.

Adapun variabel Pendidikan memiliki koefisien sebesar $0,925949$, dengan nilai probabilitas $0,1810 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel Y. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan pendidikan sebesar 1%, maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar $0,925949\%$, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Wibisono (2020) yang menemukan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat pengangguran terbuka. Dengan kata lain, peningkatan rata-rata tingkat pendidikan di suatu daerah tidak secara langsung mempengaruhi penurunan atau kenaikan tingkat pengangguran terbuka selama periode penelitian. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingginya pendidikan formal belum tentu menjamin kemudahan seseorang untuk terserap dalam pasar kerja.

Terakhir variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki koefisien sebesar $-0,0001110$, dengan nilai probabilitas $0,0147 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi Angkatan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel Y. Hal ini berarti adanya peningkatan tingkat partisipasi Angkatan kerja sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan berkurang sebesar $0,000110\%$, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Indri Dwi Lestari dan Aprillia Nilasari (2023) yang menunjukkan bahwa peningkatan TPAK berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Artinya, semakin banyak individu yang aktif masuk dan mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja, semakin besar peluang mereka untuk terserap dalam lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang.

Berdasarkan hasil pengujian estimasi yang telah dilakukan, diperoleh nilai R-Squared (R^2) sebesar $0,779890$. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar $77,99\%$ tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh variabel upah minimum, produk domestik regional bruto, pendidikan dan tingkat partisipasi Angkatan kerja. Sedangkan sisanya $22,01\%$ dijelaskan oleh variabel lain diluar model dan tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil regresi data panel terhadap 19 kabupten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode penelitian dengan model yang terpilih Fixed Effect Model, penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat. Artinya ketika upah minimum meningkat maka tingkat pengangguran terbuka juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika upah minimum menurun maka tingkat pengangguran terbuka juga akan menurun. Akan tetapi, hasil tersebut tidak signifikan dikarenakan nilai probabilitas melebihi standar signifikansi konvensional ($\alpha = 0,05$).

Selanjutnya, variabel produk domestik regional bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat. Artinya ketika produk domestik regional bruto menurun maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika produk domestik regional bruto meningkat maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun.

Disisi lain variabel pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat. Artinya ketika pendidikan meningkat maka tingkat pengangguran terbuka juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika pendidikan menurun maka tingkat pengangguran terbuka juga akan menurun. Dan hasil tersebut juga tidak signifikan dikarenakan nilai probabilitas melebihi standar signifikansi konvensional ($\alpha = 0,05$).

Terakhir, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat. Artinya ketika tingkat partisipasi angkatan kerja menurun maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika produk domestik regional bruto meningkat maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan bahwa dalam penetapan upah minimum pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan dunia usaha untuk mencegah potensi peningkatan pengangguran. Dan diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja untuk mengurangi ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki dengan permintaan pasar. Selain itu, peningkatan PDRB perlu terus didorong melalui pengembangan sektor unggulan seperti industri pengolahan, pariwisata, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah guna memperluas lapangan kerja. Begitupun tingkat partisipasi angkatan kerja juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan, fasilitasi wirausaha, dan penguatan layanan informasi kerja. Sinergi antar instansi terkait diperlukan juga agar kebijakan penanggulangan pengangguran dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Farrell, I. M., & Atmanti, H. D. (2022). Analisis pengaruh tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di 34 provinsi Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, X(X), xx-xx. <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/biceser/article/view/431>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2012). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga berlaku dan harga konstan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5360>
- Karo Karo, R. U., Simbolon, C. M., Daffa, D. S., & Hidayat, N. (2023). Analisis pengaruh IPM, UMP dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 451–463. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.113>
- Lestari, I. D., & Nilasari, A. (2023). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat

- pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2022. *Jurnal Ekuilnomi*, X(X), xx-xx. <https://doi.org/10.36985/ywmawh84>
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Edisi ketiga). Salemba Empat.
- Muslim, I. K., & Mahardika, I. G. D. (2014). Pengaruh nilai PDRB, tingkat upah, dan tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali tahun 2003–2012. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v4i1.2077>
- Puspadjuita, E. A. R. (2017). *Factors that Influence the Rate of Unemployment in Indonesia*. *International Journal of Economics and Finance*, 10(1), 140. <https://doi.org/10.5539/ijef.v10n1p140>
- Rambe, R. C., Prihanto, P. H., & Hardiani, H. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 8(1), 54–67. <https://doi.org/10.22437/jels.v8i1.11967>
- Rivai, V., Ramly, H. M., Mutis, T., & Arafah, W. (2014). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik* (Edisi ke-3). Jakarta: Rajawali Pers.
- Remus Silalahi, dkk. (2013). *Teori Ekonomi Makro*. Citapustaka Media Perintis.
- Sholeh, Mimun. 2007. *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 4 (No. 1). Yogyakarta
- Siahaan, O., Pardede, R. B. S., Rahim, R., & Desmawan, D. (2022). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan pendidikan terhadap tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 55–63. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.51>
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi: Teori pengantar* (Edisi ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibisono, C. G. (2020). Pengaruh Migrasi Masuk, Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Airlangga Development Journal*, 4(1), 83. <https://doi.org/10.20473/adj.v4i1.20170>
- Zainal Asikin. (2012). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. PT Rajagrafindo Persada.